



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER**  
**DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510  
<https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>, [redaksi@ditjenmiltun.net](mailto:redaksi@ditjenmiltun.net)

Nomor : 1327/DJMT/KP4.1.3/XI/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI

Jakarta, 07 November 2025

Kepada Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
3. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

Diberitahukan dengan hormat daftar nama hakim pengadilan di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara yang telah mendapatkan persetujuan promosi atau mutasi berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI pada tanggal 07 November 2025, sebagaimana terlampir. Selanjutnya dengan ini diminta agar Saudara memberitahukan kepada mereka yang mutasi dan/atau promosi dari satuan kerja masing-masing hal-hal sebagai berikut:

1. Segera mengirimkan berkas kelengkapan untuk pengurusan biaya pindah, sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 29/DjMT/KEP/II/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 24/DJMT/KEP/9/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pindah Tenaga Teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, terlampir;
2. Segera memperbaharui Data Keluarga, KP4 (DRH), Informasi Bank dan Nomor Rekening pada SIKEP Mahkamah Agung RI;
3. Kelengkapan berkas biaya pindah/mutasi dimaksud ditujukan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara c.q. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 9-10, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 By Pass, Jakarta Pusat 10510, selambat-lambatnya tanggal **17 November 2025** sudah harus kami terima;
4. Pembayaran biaya mutasi diperuntukkan hanya bagi Hakim yang bersangkutan, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 305 Tahun 2025 tentang Efisiensi Pembayaran Biaya Mutasi di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Biaya mutasi tidak akan dibayarkan untuk mutasi yang dilakukan atas permohonan sendiri.;
6. Untuk mempercepat proses penghitungan dan pengurusan biaya pindah, berkas kelengkapan tersebut terlebih dahulu diunggah ke [s.djmt.id/BiayaMutasi](https://s.djmt.id/BiayaMutasi)
7. Diinstruksikan bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 133/KMA/SK.KP1.1.2/VII/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan, pelaksanaan tugas di tempat atau jabatan baru paling lambat 1 (satu) bulan sejak Hakim yang bersangkutan menerima surat keputusan mutasi.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.




Ditandatangani secara elektronik oleh  
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
MAHKAMAH AGUNG RI**  
**YUWONO AGUNG NUGROHO**



HASIL RAPAT PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG RI  
PADA HARI JUMAT, TANGGAL 07 NOVEMBER 2025

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Hari Sunaryo, S.H.	Hakim PTUN Jakarta	Hakim Yustisial Kepaniteraan MA
2.	Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H.	Hakim PTUN Bandung	Hakim Yustisial Kepaniteraan MA
3.	Hari Purnomo, S.H., M.H.	Hakim PTUN Pekanbaru	Hakim Yustisial Kepaniteraan MA
4.	Dikdik Somantri, S.H., S.IP., M.H.	Hakim PTUN Jakarta	Hakim Yustisial Kepaniteraan MA
5.	Tiar Mahardi, S.H., M.H.	Hakim PTUN Serang	Hakim Yustisial Kepaniteraan MA
6.	Anita Linda Sugiarto, S.H., M.H.	Hakim PTUN Yogyakarta	Hakim Yustisial Kepaniteraan MA
7.	Dessy Anggraeni, S.H.	Hakim PTUN Serang	Hakim Yustisial Kepaniteraan MA
8.	Rendi Yurista, S.H., M.H.	Hakim PTUN Medan	Hakim Yustisial Kepaniteraan MA



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
MAHKAMAH AGUNG RI**

**YUWONO AGUNG NUGROHO**

